

EKOSISTEM ISLAM *RAHMATAN LI AL-'ALAMIN* MENCIPTAKAN HARMONIS PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Sugiyar

PPs PAI Multikultural Unisma Malang

Email: sugiyarbwi@yahoo.com

Abstract

Islam is present in the middle of multicultural society in Indonesia. The citizen who have a variety of backgrounds, ethnic, cultural, languages, or religions. Diversity becomes an opportunity as well as a challenge that build a great state and nation. It needs some elements that are synergized, mutually, reinforcing, supporting each other to form a single unit system (read: ecosystem). In this case, Islam becomes *rahmatan li al-'alamin* that has contributed great contribution in unifying the heart, minds, and action of Muslims to produce progress in various aspects of life that can be felt by Muslims themselves and others. Its transformation and application in the life of Indonesian nation is to accept unity in diversity (read: *bhinneka tunggal ika*), tolerance, humanism, democracy, harmony, moderation, safe, and peace.

Keywords: Ecosystem, Islam *rahmatan li al-'alamin*, Multicultural

Pendahuluan

Hubungan antara manusia menurut syariat Islam sebagai dasar untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Membangun keharmonisan umat Islam dalam masyarakat multikultural merupakan kerja dakwah yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Batu sandungan akan selalu mengiringi perjalanan Islam *rahmatan li al-'alamin*. Beberapa hal yang dapat menghalangi antara lain: (1) adanya

subjektivitas kepentingan pribadi, (2) menjadikan Islam sebagai ideologi dan memaksakan Islam sebagai dasar negara, serta memberlakukan hukum Islam secara formal dan kaku yang dapat memunculkan sikap intoleran, (3) adanya stigma negatif dari pihak lain yang menggambarkan bahwa ajaran Islam itu keras, diskriminatif, dan kejam, dan (4) pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang mengutamakan syari'at daripada hakikat atau esensial tujuannya (Nata, 2016: 8-9).

Menyelesaikan permasalahan atau gangguan tersebut diperlukan sikap yang bijaksana dan pengelolaan secara profesional. Pelaksanaan Islam *rahmatan li al-'alamin* membutuhkan usaha keras dan sungguh-sungguh, rasionalitas, sikap ramah, santun, toleran (*tasamuh*), tolong-menolong (*ta'awun*), moderat (*tawasuth*), seimbang (*tawazun*) dan kasih sayang (Hasan, 2016: 63-71). Kesulitan pengelolaan dalam pelaksanaan Islam *rahmatan li al-'alamin* menggambarkan tidak dapat berlangsung secara efektif. Hal ini dapat disebabkan kuatnya gangguan dan minimnya daya tangkal dan kapabilitas pengelolaannya.

Penggunaan istilah ekosistem Islam *rahmatan li al-'alamin* dimaksudkan untuk mengajak seluruh pihak saling berperan aktif dan berkontribusi positif dalam upaya

menciptakan harmonis pada masyarakat multikultural. Elemen-elemen dalam sistem diharapkan dapat bersinergi dengan secara efektif dan efisien.

Islam *Rahmatan Li al-'Alamin*

Secara etimologi, *al-rahmah* yang mengandung arti *riqqat taqtadli al-ihsan ila al-marhum wa qad tusta'malu taaratan fi al-riqqah al-mujarradah, wa taaratan fi al-ihsan al-mujarradah an a-riffah*. Sikap kasih simpati yang mendorong seseorang yang berbuat kebaikan terhadap orang yang perlu dikasihani, suatu ketika seseorang hanya bersikap simpati saja, dan pada saat yang lain seseorang berbuat kebaikan namun tidak ada rasa simpati kepada orang lain (al-Ashfahany, tt: 196 dalam Nata, 2016: 5). *Al-Rahman* merupakan sifat Allah swt yang mulia "mendominasi" segala sesuatu sehingga semangat kasih merupakan unsur utama moral ketuhanan (*takhallaqu bi akhlaq Allah*) yang untuk ditegakkan di antara sesama umat manusia. (Gaus AF, 2006: 218). Pelaksanaan moral ketuhanan dapat dilihat dari nama-nama Allah yang baik (*al-asma' al-husna*). Sikap dan perilaku individu menjadi manifestasi pelaksanaan moral ketuhanan, sehingga menjadi *insan kamil*. Individu yang memiliki kesalehan spiritual, kesalehan sosial, dan kesalehan personal.

Kesalihan individu tersebut sejalan dengan makna *'alamin* yaitu *jami'u khalaiq*, artinya semua makhluk ciptaan Allah (al-Baaz, 2007: 2 dalam Nata, 2016: 5). Semua ciptaan Allah yang hidup, baik hidup sempurna maupun terbatas. Hidup mengindikasikan adanya gerak, rasa, dan tahu. Maka, dalam hal ini ada alam malaikat, alam manusia, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, namun tidak ada alam batu karena ia tidak memiliki

indikator hidup (Shihab, 2002: 39). Berdasarkan pendapat tersebut memberikan gambaran secara konkrit tentang alam semesta. Segala yang diciptakan oleh Allah swt. Manusia seyogyanya bersikap dan berperilaku kasih dan simpati terhadap ciptaan-Nya. Inilah sebagai bentuk *rahman* manusia terhadap makhluk-Nya.

Islam *rahmatan li al-'alamin* artinya memahami sumber-sumber hukum Islam secara komprehensif dan mendalam untuk kebaikan semua manusia, alam, dan lingkungan. Islam mengajarkan kasih simpati pada semua makhluk Allah swt: manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, air, tanah, api, udara, dan sebagainya (Jabali, 2011: 42). Manusia memperlakukan makhluk ciptaan-Nya dengan penuh kasih sayang. Perlakuan yang diberikan tentunya memerhatikan karakteristik masing-masing. Sikap dan perilaku antara manusia tentunya mengandung nilai-nilai yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaannya. Sementara bagi selain manusia, misalnya tumbuh-tumbuhan atau binatang diperlakukan dengan baik terkait dengan kebutuhan naturalnya. Dengan demikian, manusia dapat menjaga dan melestarikan ekosistem lingkungan sekitarnya bagi kemaslahatan umat manusia.

Islam dan Keberagaman Kultural

Islam mengakui adanya kesetaraan (*equal*) manusia dalam berbagai aspeknya, baik penciptaannya, persaudaraan, maupun wilayah tempat tinggalnya. Seluruh kelompok manusia yang disatukan oleh sesuatu hal, baik agama yang satu, masa yang satu, maupun tempat yang satu disebut dengan ummat (Imarah, 1999: 149). Memahami makna umat dengan menggunakan frame *ta'aruf* (saling kenal) yang bermakna interaksi, yang berlangsung dalam

kerangka kesatuan yang tidak mengikari dan tidak melupakan pluralitas, perbedaan, kekhasan, dan multikultur. Kerangka kebudayaan dan peradaban umat menjadikan horizonnya selalu meluas untuk menaungi orang-orang yang mempunyai kesamaan dalam kerangka itu. Dan menjadikan kesatuannya sebagai medan keragaman dan pluralitas. Q.S. al-Hujurat [49:13]: *"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"*.

Keberagaman kultural menjadi karakter bangsa Indonesia. Keberagaman kultural dapat disebut pula dengan multikultural. Multikultural mendorong kepada setiap individu agar memiliki apresiasi dan respek terhadap suku, budaya, agama, bahasa, dan tradisi orang lain. Paradigma multikultural menempatkan dan memposisikan keberagaman latar belakang secara setara (*equal*). Meskipun setiap individu memiliki dan menyakini serta menjaga identitas dan kepribadian masing-masing dengan tetap hidup berdampingan dengan saling menghormati, saling menghargai, dan saling bekerjasama dalam perbedaan dalam suasana damai dan rukun (*coexistence*) (Hasan, 2016: 38-39).

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menunjukkan sebuah wilayah dengan keragaman budaya, etnis, bahasa, dan agama. Keragaman berkaitan dengan istilah dalam kemajemukan antara lain:

bhineka, pluralisme, pluralitas, dan multikulturalitas. Pluralitas dan heterogenitas masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa dengan semboyan *"Bhineka Tunggal Ika"*. Semboyan ini menunjukkan sesungguhnya masyarakat Indonesia yang plural dan diikat dengan satu kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki kemajemukan yang penuh dengan kekayaan sosio-kultural yang tidak ternilai. Kemajemukan adalah *sunnatullah* (hukum alam) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan negara plural sekaligus multikultural. Pluralitas kultural di Asia Tenggara, khususnya Indonesia sangat mencolok, terdapat hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti itu (Hefner, 2001: 4). Multikultural menempatkan pluralitas masyarakat secara proporsional dan adil. Secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (Azra, 2007:24).

Ekosistem Islam Rahmatan Li Al-'Alamin

Dalam tulisan ini akan diketengahkan beberapa elemen Islam *rahmatan li al-'alamin* dalam sebuah ekosistem. Elemen-elemen yang dimaksud adalah: (1) Indonesia sebagai "Rumah Multikultural", (2) peran ulama dalam masyarakat global, (3) peran pemerintah pusat dan daerah, (4) peran lembaga pendidikan agama dan keagamaan, (5) kontribusi organisasi kemasyarakatan, dan (6) kontribusi masyarakat madani.

Indonesia sebagai “Rumah Multikultural”

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago*). Tidak dapat dipungkiri adanya keragaman budaya, bahasa, suku, dan agama tumbuh dan berkembang pada setiap daerah dengan corak dan karakter yang beragam pula. Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia (Yaqin, 2005:3). Keberagaman menjadi sebuah mozaik yang indah terhampar di wilayah Indonesia bilamana ditata dan dikelola dengan baik. Namun sebaliknya, hal ini juga dapat memicu berbagai ragam konflik, baik vertikal maupun horizontal. Diskriminasi, konflik sosial keagamaan, krisis politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan terjadi pada setiap level masyarakat. Banyak terjadi hal-hal yang justru jauh dari harapan kemanusiaan yang mengedepankan nilai-nilai sosial, harmonis, toleran, rasa aman, damai, dan egaliter.

Multikultural berarti menerima adanya keragaman ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan. Pemahaman dan wawasan multikulturalisme dibumikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Kurangnya pemahaman multikultural yang komprehensif justru menyebabkan degradasi moral generasi muda. Sikap dan perilaku yang muncul seringkali tidak simpatik, bahkan sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya luhur nenek moyang. Sikap-sikap seperti kebersamaan, saling menghargai, dan saling membantu/gotong-royong mulai pudar. Adanya arogansi akibat dominansi kebudayaan mayoritas menimbulkan kurangnya pemahaman dalam berinteraksi dengan budaya maupun orang lain.

Berbagai persoalan yang muncul akibat adanya keberagaman atau kemajemukan, diperlukan kepedulian dan partisipasi semua komponen bangsa untuk menjaga dan merawatnya. Azra mengemukakan merayakan kemajemukan adalah merawat Indonesia. Kemajemukan negara-bangsa harus dirawat, dipelihara, diberdayakan, dan difungsionalisasikan untuk hari ini dan hari esok negara-bangsa Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Indonesia sebagai negara-bangsa (*nation-state*) memiliki kemajemukan atau multikultural adalah *sunnatullah*, hukum alam (*natural of law*) menjadi anugerah yang luar biasa. (Azra, 2007: 5). Indonesia sebagai “rumah multikultural” harus tetap dijaga dan dipelihara agar menjadi *baladun tayyibatun*.

Peran Ulama dalam Masyarakat Global

Ulama menunjuk orang yang memiliki ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum (Burhanuddin, 2002: xxvii). Sebutan ulama dilabelkan pada orang yang memiliki keahlian dalam ilmu-ilmu agama yang memiliki hak istimewa (*previleges*). Ulama sebagai pemimpin agama atau pemuka agama yang bertugas memberikan pengayoman, pembimbingan, dan pembinaan umat Islam baik dalam masalah keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Dalam konteks keindonesiaan, sebutan ulama berbeda-beda pada wilayah tertentu, diantaranya: Kyai (Jawa), Tuan Guru (Nusa Tenggara), Tengku (Aceh), Ajengan (Sunda), dan Syeikh (Sumatra Utara). Secara esensial memiliki karakter fundamental yang berkualitas tinggi dalam hal iman, takwa, dan ilmu-ilmu agama secara mendalam sebagai ciri khasnya.

Kyai dipandang sebagai tokoh ideal dalam sebuah komunitas, baik dalam lembaga pendidikan maupun sosial-masyarakat. Peran kyai dalam pandangan ideal sebagai *mediator*, *dinamisator*, *katalisator*, *motivator*, maupun sebagai *power* bagi komunitas yang dipimpinnya. Keberadaan kyai pada sebuah komunitas yang dipimpin tidak sekedar menjalin hubungan dengan dunia luar melainkan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lembaga Islam. Dalam menjalankan perannya seorang kyai harus memenuhi kriteria, diantaranya adalah integritas, kebijaksanaan, kapasitas, profesionalitas, kekuatan moral, dan mampu untuk dijadikan suri tauladan (Nasir, 2010: 304). Seiring perkembangan masyarakat global, maka peran kyai menjadi lebih luas lagi. Selain bidang pendidikan dan keagamaan, juga termasuk bidang ekonomi, politik, dan bidang lainnya untuk kemaslahatan umat.

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah dengan unsur kelengkapan negara lainnya memiliki kewenangan untuk membuat regulasi atau peraturan perundangan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan perundangan sebagai payung hukum penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, politik, pertahanan dan keamanan, sumber daya alam, kehidupan umat beragama, dan bidang-bidang lainnya. Pemerintah membuat kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan kerukunan antar umat beragama agar dapat terpelihara dan dilestarikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah

ibadah. Pemerintah membuat peraturan perundangan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan atau upaya-upaya untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama.

Pemerintah mengakui secara resmi terhadap eksistensi agama-agama untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Agama-agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Konghucu menjadi satu persoalan yang harus diperhatikan secara serius. Terwujudnya kerukunan umat beragama menjadi dambaan masyarakat Indonesia. Banyak terjadi konflik yang mengatasnamakan agama yang berlangsung cukup lama di beberapa negara. Harmonisasi antar umat beragama perlu dilakukan secara konkrit melalui dialog antar umat beragama, kerjasama, tolong-menolong, dan menghindari kekerasan yang mengatasnamakan agama yang dapat dilakukan dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan (PB Menag & Mendagri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, Pasal 1 ayat 6).

Kepedulian pemerintah sebagaimana diungkapkan Menteri Agama dalam sambutannya:

“Kita perlu senantiasa memperhatikan perkembangan dan gerak dinamis FKUB. Dalam hal ini, kepengurusan, keanggotaan, program, dan kegiatan yang ditampilkan FKUB merupakan sari pati dari wajah asli setiap

FKUB, yakni apakah ia sudah berjalan sesuai dengan harapan yang semestinya. Dari realitas tersebut, kita berharap tampak pantulan optimis bahwa FKUB yang semakin bergerak ke arah yang lebih dinamis, kreatif, dan semakin mencerminkan tumbuhnya nilai-nilai kebersamaan, kemanusiaan, kepedulian untuk kebangkitan besar sebuah bangsa.”

Perhatian secara konkrit terhadap FKUB dari berbagai pihak yang peduli terhadap penciptaan kerukunan umat beragama. Unit yang memiliki tugas dan fungsi untuk menciptakan kondisi kerukunan umat beragama yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Latihan Kementerian Agama. Beberapa hal yang dapat dilakukan unit ini adalah penyusunan program penelitian atau pengembangan dalam bentuk kajian, diskusi, seminar, dan kegiatan lain yang relevan. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2009 memiliki benang merah bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap FKUB menjadi kekuatan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan bersama. Dukungan pemerintah daerah berupa dana atau dukungan sosial dan kebijakan strategis untuk mewujudkan kerukunan dan stabilitas tetap terjaga (Kustini, 2010: ix-xi).

Peran Lembaga Pendidikan Islam

Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga pendidikan pada jalur formal maupun nonformal berbentuk madrasah, sekolah, dan pondok pesantren. Salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam yang menjadi cikal bakal dan memberikan kontribusi besar adalah pesantren. Dinamika pesantren dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan pergeseran seiring tuntutan masyarakat global. Menurut Ma'shum fungsi pesantren semula mencakup tiga aspek, yaitu fungsi religius (*diniyah*), fungsi sosial (*ijtimaiyah*), dan fungsi edukasi (*tarbawiyah*). Ketiganya tetap berlangsung hingga sekarang. Selain itu, pesantren memiliki peran pembinaan moral dan kultural. Pembinaan moral dan kultural dilakukan terhadap santri dan masyarakat. Kedudukan ini mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan keadilan sosial melalui pesantren dengan pendekatan kultural (Qomar, 2002: 23).

Pesantren berperan dalam berbagai bidang secara multidimensional baik berkaitan langsung dengan aktivitas-aktivitas pendidikan pesantren maupun di luar wewenangnya. Pesantren terlibat dalam menegakkan negara dan mengisi pembangunan sebagai pusat perhatian pemerintah. Peran penting pesantren dalam masyarakat Indonesia adalah; (1) pusat berlangsungnya tranmisi ilmu-ilmu Islam tradisional, (2) pemelihara dan penjaga keberlangsungan Islam tradisional, dan (3) pusat reproduksi ulama atau ahli agama (Qomar, 2002: 25-26). Dewasa ini, pesantren berperan aktif dalam berbagai hal, diantaranya; pusat pengembangan keterampilan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna, dan pusat penyuluhan

kesehatan (Azra, 1999: 105). Kepekaan pesantren terhadap berbagai permasalahan sosial masyarakat memposisikannya menjadi populis.

Munculnya diskursus tentang pluralisme, pluralitas, multikultural dan sejenisnya mendorong beberapa pesantren membuka diri terhadap persoalan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar fungsi dan peran pesantren lebih komprehensif di tengah-tengah masyarakat multikultural. Sebagai contoh adalah pesantren Ngalah Pasuruan, dari hasil sebuah riset menunjukkan pesantren yang mengembangkan pluralisme. Nafis (2017: 303-304) menjelaskan pengembangan pluralisme di pesantren dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor geneologis (silsilah Kyai Sholeh yang telah membangun keharmonisan antaragama dalam pemikiran dan tindakan), faktor *link* kyai, faktor *link* mursyid thariqah (dogma tentang sisi kemanusiaan dan hubungan antaragama), faktor autodidak, faktor heterogenitas komunitas, dan faktor nasionalisme. Disinilah diperlukan sebuah konstruksi dialog antaragama secara sosial dan tidak semata tertuju pada individu, dengan demikian ada titik singgung kesalihan individu dan kesalihan sosial.

Kontribusi

Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 menyebutkan, bahwa: "Organisasi kemasyarakatan disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Pasal 1 ayat (1)). Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia telah menjadi merek paten bagi gerakan Islam moderat, modern, inklusif, konstruktif, dan komunikatif dalam era millennial.

Nahdlatul Ulama merepresentasikan Islam Nusantara. Said Aqil Siradj mengemukakan bahwa "Islam Nusantara merupakan gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di Tanah Air. Ini bukan barang baru di Indonesia. Sebagai organisasi masyarakat Islam, Nadlatul Ulama menjalankan konsep Islam Nusantara yang menunjukkan kearifan lokal Indonesia." Menurut Sahal, Islam Nusantara merupakan Islam yang ramah, terbuka, inklusif dan tanggap terhadap permasalahan besar bangsa dan negara dengan sebuah tawaran solusi. Islam yang dinamis, egaliter, dan mampu beradaptasi serta bersahabat dengan lingkungan budaya, dan agama yang beragam (Munfaridah, 2017: 21). Islam dilepaskan dari bayang-bayang budaya Arab, maka budaya nusantara dinilai absah merumuskan Islam yang khas Nusantara (Wijaya, 2011: 231).

Organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dan strategis dalam mengemban tugas menciptakan kemaslahatan umat. Dewasa ini NU sebagai organisasi kemasyarakatan mengembangkan perannya dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya; bidang pendidikan, bidang sosial-keagamaan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan pengembangan organisasi secara komprehensif. Dengan demikian peran dan kontribusinya diharapkan akan mampu memberikan tawaran solusi

efektif terhadap berbagai masalah sosial.

Kontribusi Masyarakat Madani (Civil Society)

Memasuki era reformasi banyak bermunculan *civil society* sebagai sebuah gerakan yang berkaitan dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan berekspresi. Ada beberapa sebutan yang muncul, antara lain *non-government organization* (NGO) atau organisasi non-pemerintah (ornop), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan *civil society organization* (CSO). Seiring berjalannya waktu *civil society* dalam penerapan dan tujuannya memiliki variasi yang berbeda-beda di tiap-tiap masyarakat (Tilaar, 2004: 46).

Rosenbloom dan Post mengemukakan tiga hal mengenai hubungan komplementer *civil society* dengan pemerintah, yaitu; (1) *civil society* mendorong ke arah terbentuknya organisasi masyarakat sendiri sebagai tujuan terwujudnya masyarakat demokratis, (2) *civil society* mengorganisasikan untuk berperan aktif secara demokratis, dan (3) *civil society* merupakan forum sosialisasi nilai-nilai politik untuk pemerintahan sendiri. Peran *civil society* sebagai komplementer pemerintah yang demokratis, untuk memberikan kesadaran kepada setiap warga negara akan tanggung jawab dalam kehidupannya. Dengan demikian *civil society* merupakan gerakan masyarakat bersama pemerintah untuk membangun masyarakat yang transparan, humanis, demokratis, dan toleran (Tilaar, 2004: 48).

Relasi *civil society* dengan pemerintah diharapkan dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan bersama. *Civil society* berhubungan

dengan kepentingan komunitas tertentu, sedangkan pemerintah berkaitan dengan rakyat secara keseluruhan. Peranan *civil society* sebagai komplemen tugas pemerintah, bahwa keduanya tidak saling bertetangan tetapi justru bersinergi satu sama lainnya. Hal-hal yang tidak mampu dijangkau dan terabaikan oleh pemerintah, maka *civil society* mengambil peran aktif untuk melihat pada akar rumput (*grass root*). Kedua belah pihak harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral bilamana terjadi perbedaan agar gerakan yang dilakukan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas sesuai dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.

Hampir dua dasawarsa reformasi telah bergulir di Indonesia. Pada awal-awal reformasi banyak isu yang mengemuka, menurut pengamatan Abdurrahmad Wahid wacana nasionalisme dan agama kurang mendapat perhatian (Tilaar, 2004: 55). Saat ini isu tentang nasionalisme dan agama mulai mengemuka kembali. Indonesia dikenal sebagai negara muslim terbesar di dunia, namun terkenal dengan muslim moderat. Ada beberapa agama besar yang hidup di masyarakat Indonesia. Dalam perjalanannya, hubungan antar umat beragama mengalami pasang surut. Peran konkrit masyarakat madani (*civil society*) melalui dialog bersama, sikap inklusif, dan kerjasama yang nyata dengan menghargai perbedaan-perbedaan sebagai modal komunitas Indonesia yang besar. Berbagai upaya penyelesaian masalah masyarakat dilakukan secara berkelanjutan melalui dialog, komunikasi, sikap toleran, humanis, dan demokratis bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Simpulan

Berdasarkan uraian dan paparan singkat di atas, dapat dikemukakan simpulan tentang ekosistem Islam *rahmatan li al-'alamin* pada masyarakat multikultural di Indonesia:

Islam *rahmatan li al-'alamin* memberikan kontribusi pada penyatuan hati (*heart*), pikiran (*head*) dan tindakan (*hand*) untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan yang bermanfaat bagi muslim maupun non muslim. Sinergitas ketiga hal tersebut akan dapat melahirkan individu yang toleran, humanis, harmonis, demokratis, moderasi, dan egaliter.

Ekosistem Islam *rahmatan li al-'alamin* merupakan elemen-elemen dasar dalam praktik dan implementasi agama dan keagamaan Islam. Beberapa elemen yang dimaksud adalah; (1) Indonesia sebagai "Rumah Multikultural", (2) peran ulama dalam masyarakat global, (3) peran pemerintah pusat dan daerah, (4) peran lembaga pendidikan agama dan keagamaan, (5) kontribusi organisasi kemasyarakatan, dan (6) kontribusi masyarakat madani. Keterkaitan diantara elemen-elemen tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah bangsa yang harmonis, aman, damai, rukun, tenteram, dan sejahtera.

Daftar Rujukan

- Al-Ashfahany, al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfaadz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Baaz, Anwar. 1428 H/2007 M. *Al-Tafsir al-Tarbawy li al-Qur'an al-Karim*. Jilid. I. Mesir: Dar al-Nasyr li al-Jami'ah.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azra, Azyumardi. 2007. *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Burhanudin, J. 2002. *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gaus AF, Ahmad. dkk (ed). 2006. *Ensiklopedi Nurkholish Madjid: Pemikiran Islam di Atas Kanvas Peradaban*. Jakarta: Mizan.
- Hasan, Muhammad Tholchah. 2016. *Pendidikan Multikultural sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*. Malang: Lembaga Penerbitan Unisma.
- Hefner, Robert W. 2001. *The Politic of Multiculturalism and Citizenship in Malaysia, Singapore*. USA: University of Hawaii Press.
- Imarah, Muhammad. 1999. *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Jabali, Fuad, dkk. 2011. *Islam Rahmatan lil 'Alamin*. Jakarta: Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Agama Islam.
- Kustini (ed). 2010. *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Jakarta Mizan.
- Munfaridah, Tuti. 2017. "Islam Nusantara sebagai Manifestasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mewujudkan Perdamaian".

- Wahana Akademia* Vol. 4, No. 1 (4):19-34.
- Nafis, M. Muntabihun. 2017. *Pesantren Plurali: Peran Pesantren Ngalah dalam Mengembangkan Nilai-nilai Pluralisme di Tengah Masyarakat yang Multikultural*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Nasir, M. Ridwan. 2010. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nata, Abudin. 2016. "Islam Rahmatan Lil Alamin sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki ASEAN Community." Makalah disampaikan pada acara Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Senin, 7 Maret.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Qomar, Mujamil. 2002. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wijaya, Aksin. 2011. *Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai di Nusantara*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Yaqin, M. Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.